



**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**PERAN PENGENDALIAN INTERNAL, INTEGRITAS, DAN PROFESIONALISME DALAM MENCEGAH KECURANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

***THE ROLE OF INTERNAL CONTROL, INTEGRITY, AND PROFESSIONALISM IN PREVENTING FRAUD IN THE STATE CIVIL APPARATUS OF THE GOVERNMENT OF RIAU PROVINCE***

**Raja M. Mubyansa Kurniawan<sup>1\*</sup>, Rita Anugerah<sup>2</sup>, Meilda Wiguna<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru*

\*Email: Rajakurniawan05@gmail.com

**Keywords**

*Fraud Prevention; Fraud; State Civil Apparatus*

**Article informations**

*Received:*

*2024-11-01*

*Accepted:*

*2025-03-24*

*Available Online:*

*2025-03-25*

**Abstract**

*There is a lot of fraud that harms an organization, especially the Regional Apparatus Organization (ASN). One form of fraud that often occurs is corruption, therefore fraud must be prevented through fraud prevention. The purpose of this study is to evaluate and assess how internal control, integrity, independence, and professionalism affect the prevention of fraud in the province of Riau regional apparatus organizations. 756 state government servants with positions in echelons 2, 3, and 4 in 46 Regional Apparatus Organizations (OPD) in the province of Riau made up the study's population. Purposive sampling was employed in the sampling procedure. 184 civil personnel with jobs in 46 OPDs made up the study's sample size. Multiple linear analysis techniques are used in the data processing procedure. The findings demonstrated that fraud prevention was impacted by internal control, honesty, independence, and professionalism in the Riau Province Regional Apparatus Organization. Based on the findings of this investigation in order to stop, steer clear of, and reduce fraud charges, leaders should be able to focus on the state of ASN related to Internal Control. Integrity, Independence, and Professionalism of ASN.*

**PENDAHULUAN**

Pada era teknologi yang telah maju dan mengalami globalisasi, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang kerap berhubungan dengan kecurangan. Tindakan berupa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang memiliki pertentangan pada nilai suatu masyarakat, karena hal tersebut banyak menimbulkan kerugian baik materiil ataupun moril, seperti Rusaknya naa baik dalam organisasi, kerugian finansial, rendahnya semangat kerja karyawan, dan berdampak akan hal negatif. Kecurangan Salah satu jenis penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghasilkan kerugian disebut kecurangan. Kecurangan sendiri adalah jenis ketidakjujuran yang berpotensi menghasilkan kerugian bak pada



perusahaan ataupun instansi, tetapi tidak sebatas hanya korupsi, hal lain juga seperti pemalsuan, penipuan, pencurian barang dan uang (Dewi & Ratnadi, 2017).

Sebagaimana dinyatakan oleh Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), kecurangan memiliki beberapa jenis, termasuk kecurangan korupsi pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan yang terjadi di sektor publik karena pemerintah memberikan pendapatan dan pengeluaran kepada pegawai negeri terkait dengan kekuasaan dan wewenangnya untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan publik (Pratama, 2022). Kecurangan memiliki faktor penyebab teradinya yang tidak lepas dari konsep segiempat kecurangan yakni tekanan (*pressure*) yang merupakan tindakan yang mendorong seseorang yang menjadi penyebab melakukan kecurangan dikarenakan terdapat masalah pada finansial dalam memenuhi kebutuhan, Peluang muncul dari kurangnya efektivitas anti-penipuan. Rasionalisasi merupakan sikap pembenaran yang muncul dari merasionalisasi perilaku curang sebagai hal yang wajar dan kemampuan (*capacity*) merupakan kemampuan untuk menentukan bagaimana pelaku dapat melawan karakteristik kecurangan yang dilakukan.

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang diambil dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) Sejak 2007 hingga 2023, setidaknya 10 pemimpin daerah di Provinsi Riau didakwa KPK atas tuduhan korupsi. Mereka meliputi tiga gubernur, enam bupati, dan satu walikota. “Jika digabungkan dengan aktivitas korupsi 10 kepala daerah tersebut, maka kerugian pemerintah mencapai Rp 2,2 triliun dan suap/imbalan sebesar Rp 18,5 miliar,” kata peneliti ICW pada (9/4/2023). Oleh karena itu Tindakan-tindakan kecurangan ini sangat merugikan dan berdampak buruk bagi berbagai aspek termasuk kerugian suatu daerah. Dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun Provinsi Riau sudah mengalami jumlah kerugian yang tidak sedikit jumlahnya dan Provinsi Riau termasuk diantara provinsi yang terdapat kasus korupsi dalam jumlah besar di Indonesia menurut ICW. Salah satu kasus kecurangan yang terjadi dikutip dari [news.detik.com](http://news.detik.com) (1 september 2023) adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala BPN Riau dengan total kerugian senilai 12 milyar. Mantan kepala BPN Riau tersebut menerima uang sebesar Rp3,5 milyar dari General Manajer (GM) PT. Adimulia Agrolestari, dilakukannya hal tersebut karena dapat memberikan kemudahan dalam mengurus perpanjangan pada izin hak guna usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari. Terdapat juga kasus lain yang terjadi pada periode oktober-desember 2022, kasus tersebut terjadi pada Sekwan Riau yang melibatkan mantan Plt Sekwan Riau. Kasus tersebut membuat Provinsi Riau mengalami kerugian dengan total Rp2,3 milyar. Kecurangan yang dilakukan oleh mantan Plt Sekwan Riau tersebut adalah dengan membuat surat pejalanan dinas fiktif yang dikutip dari [antaranews.com](http://antaranews.com) pada (15 mei 2024).

Berdasarkan fenomena diatas Provinsi Riau telah terjadi banyak sekali kecurangan yang menyebabkan kerugian diberbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengendalian internal di suatu instansi dan tidak terdaptanya sikap integritas, independensi dan profesionalisme oleh Aparatur Sipil Negara (Purnamasari et al., 2023). Pengendalian internal yang efektif secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi, menghasilkan keandalan laporan keuangan, melindungi aset, dan mendorong kepatuhan pada peraturan untuk meminimalkan risiko kerentanan dan penipuan dapat ditekan (Wijaya & Adechandra A. P, 2020)

Banyak sekali kecurangan yang merugikan baik kepada suatu organisasi, instansi, dan pemerintah oleh karena itu kecurangan tersebut haruslah dicegah, pencegahan kecurangan Menurut Makarimovic et al., (2022) menyatakan bahwa tindakan mencegah dalam kecurangan adalah upaya terpadu dapat mengurangi terjadinya anti-fraud melalui sistem dan prosedur yang dikembangkan. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mencegah penyelewengan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah penerapan upaya preventif dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran melalui sistem dalam pelaporan pelanggaran yang dilakukan dan diakses dengan telepon, fax, SMS, website, email atau surat. Pemerintah juga telah memberlakukan persyaratan pelaporan LHKPN adalag



Seluruh pegawai pemerintah yang termasuk dalam kategori wajib lapor wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya. Pemerintah juga mempekerjakan pejabat yang jujur dan terbuka menggunakan sistem CAT untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terkait suap.

Pemerintah Provinsi Riau juga telah menerapkan berbagai upaya preventif, antara lain: Penciptaan zona integritas antikorupsi, optimalisasi dan pelaksanaan pelatihan antikorupsi di tingkat dasar dan menengah, pemberian pedoman integritas teknis untuk seluruh personel tingkat III dan IV, manajemen teknis dan penerapan aplikasi pusat pemantauan preventif (MCP). Pedoman evaluasi rencana tindak lanjut sektor sumber daya alam serta memiliki kerjasama pada lembaga hukum dalam memfasilitasi penguatan lembaga pengawasan internal pemerintah. Upaya penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam pengawasan preventif dan implementasi Gerakan IT Liawgo yaitu untuk memberikan layanan terbaik berbasis teknologi informasi untuk masyarakat lokal, terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan tugas pemerintah, sosialisasi. Pelayanan publik seperti informasi. Kasus korupsi yang marak terjadi pada pemerintahan merupakan faktor penyebab kurangnya implementasi dari beberapa faktor yang dimiliki oleh aparatur sipil negara dalam mencegah kecurangan (Farah & Rahmawati, 2021). Faktor tersebut merupakan pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pencegahan kecurangan. Penelitian (Ayu Az-Zahra et al., 2021) dan (Leighton Silambi et al., 2023) Pengendalian internal berpengaruh pada pencegahan kecurangan. Pengendalian adalah cara untuk mencegah kecurangan dalam perusahaan dengan mengurangi peluang terjadinya fraud (Fitroh Nurani, 2016). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Kivaayatul et al., 2022) dan (Rosari et al., 2021) Integritas berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh orang lain menunjukkan hasil yang berbeda (Eldayanti et al., 2020). Saputra et al.(2020), menemukan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Ini dapat menunjukkan bahwa tingkat independensi pegawai yang tinggi atau rendah tidak menjamin mereka dapat menemukan kecurangan dalam LPD karena kecurangan dapat terjadi kapan saja.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari Olivia & Lastanti (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal, Independensi, *Whistleblowing System*, *Anti-Fraud Awareness*, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada PT. Inna Pharmaceutical Industry kota Bogor)”. Terdapat dua perbedaan dengan penelitian ini. Pertama, peneliti mengganti variabel *Anti-Fraud Awareness* dan *Whistleblowing system* dengan variabel profesionalisme. Karena variabel *Anti-Fraud Awareness* dan *Whistleblowing system* memiliki keterbatasan dalam mengukur perubahan perilaku aparatur sipil negara atau staf dengan akurat. Kedua, pemilihan lokasi penelitian yang berbeda. Pada penelitian Olivia dan Lastanti (2023) lokasi penelitiannya adalah PT. Inna Pharmaceutical Industri kota Bogor. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan lokasi pada OPD di Provinsi Riau. Pengubahan studi empiris pada penelitian ini dilakukan untuk pembaruan pengetahuan terkait pencegahan kecurangan dan memperbaharui informasi yang telah kadaluwarsa, selain itu juga karena tingginya kasus kecurangan yang ada di Provinsi Riau dan juga untuk memperluas wilayah penyebaran kuisioner dari penelitian sebelumnya guna mendapat banyak informasi baru terkait pencegahan kecurangan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan***

Aktivitas pengendalian internal berbeda untuk pemerintahan dan birokrasi yang berbeda. Kesalahan dan kecurangan akan meningkat ketika pengendalian internal pemerintah lemah. Sebaliknya, ketika ada pengendalian internal yang kuat, kesalahan dan kecurangan dapat

dikurangi (Dewi dan Ratnadi, 2017). Pengendalian ini krusial dalam menghindari dan mengidentifikasi penipuan serta menjaga aset instansi pemerintah. Tidak ada kaitan antara kegiatan pemerintahan dan pengendalian. Selain merencanakan dan melaksanakan tugas, pengendalian juga merupakan bagian dari fungsi manajemen.

Penjelasan ini dapat dihubungkan dengan teori keagenan yang mana teori ini mengasumsikan Principal bertanggung jawab untuk mengawasi manajer dalam hal pengelolaan pemerintahan yang efektif. Menurut (Oyong, 2012)., asimetri informasi adalah salah satu dari banyak masalah yang disebabkan oleh ketimpangan informasi antara pemilik dan agen. Ini menunjukkan bahwa manajer tidak selalu melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan lebih sering, mereka bertindak demi kepentingan mereka sendiri dalam konflik kepentingan dalam konteks pengendalian internal pemerintah, teori agensi berlaku karena ASN (agen) bertindak atas nama masyarakat atau pemegang kepentingan (prinsipal) dalam menyelenggarakan layanan publik dan mengelola sumber daya publik. Pengendalian internal pemerintah bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara ASN yang bertindak sebagai agen dan Masyarakat sebagai pemegang kepentingan. ini dengan memperkuat pertanggungjawaban, transparansi, dari ASN dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya.

Penelitian oleh Wulandari & Nuryanto (2018) Ayu Az-Zahra et al. (2021) Ibrahim et al. (2023) menemukan bahwa dengan pengendalian internal yang baik, kecurangan dapat dideteksi dan dicegah sejak awal. Dengan demikian, jika pengendalian internal diterapkan dengan baik, kemungkinan terjadi kecurangan dapat diminimalkan.

### ***Pengaruh Integritas Terhadap Pencegahan Kecurangan***

Agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada komunitas, memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan institusi publik, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber publik serta memperbaiki mutu sumber daya manusia, integritas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting. Aparatur sipil negara memerlukan integritas yang tinggi untuk berlaku jujur dan sesuai etika. Aparatur sipil negara akan memberikan kinerja yang maksimal dan tidak dapat terpengaruhi pada kondisi menyudutkan.

Seseorang dengan integritas yang tinggi tidak akan mudah terjebak oleh situasi atau iming-iming yang ditawarkan untuk melakukan kecurangan, maka integritas yang tinggi sangatlah penting (Aryani & Fitri, 2023). ASN harus memahami pentingnya tanggung jawab moral dan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai tujuan integritas ini, ASN dapat menggunakan berbagai inisiatif dan kebijakan, seperti penerapan ketat dalam kode etik dan pelatihan moral dan etika, melakukan pengawasan ketat di dalam dan di luar ASN, serta memberlakukan sanksi yang tepat (Budiman, 2020). Penjelasan ini dapat dihubungkan dengan teori segitiga kecurangan dimana Ketika seorang ASN memiliki integritas yang tinggi dalam dirinya maka ASN tersebut mampu menghadapi kondisi dimana Ketika ada suatu opportunity (peluang) dan pressure untuk melakukan kecurangan ASN tersebut dapat mencegah dan tidak melakukan tindakan kecurangan tersebut.

Wulandari & Nuryanto (2018), Ayu Az-Zahra et al. (2021) Febriansyah & Indirwan (2022) menjelaskan bahwa penerapan integritas pada karyawan yang baik dapat mengurangi kecurangan di suatu organisasi. Ini karena dalam membangun suatu sistem untuk mencegah kecurangan, harus ada integritas antara pegawai dan integritas data yang terpercaya sehingga informasi yang didapatkan valid dan dapat diandalkan.

### **H<sub>2</sub>: Integritas Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan.**

### ***Pengaruh Independensi Terhadap Pencegahan Kecurangan***

Prawiro (2018) menjelaskan Independensi adalah ketika seseorang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang disebut independen



ketika mereka membuat keputusan tidak berdasarkan ketergantungan dari orang lain atau kebijakan. Karir, keuangan, penampilan, politik, ekonomi, dan bidang lainnya termasuk dalam independensi. Semua Pegawai Negeri Sipil harus mandiri, artinya mereka tidak dipengaruhi atau bergantung pada orang lain; sikap tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan. Aparatur sipil negara tidak diperbolehkan untuk memihak pada kepentingan siapapun. Apabila seorang aparatur sipil negara menemukan sebuah kecurangan, maka kecurangan tersebut harus tetap dilaporkan meskipun berada dalam tekanan dari suatu (Ratmono et al., 2018).

Independensi dapat memainkan peran penting dalam mencegah kecurangan. ASN yang memiliki Tingkat independensi yang tinggi lebih mampu menolak tekanan (pressure) untuk terlibat dalam suatu tindakan kecurangan. Selain mampu menolak tekanan (pressure) seorang ASN dengan tingkat independensi yang tinggi juga mampu menolak terlibat dalam tindakan kecurangan Ketika adanya suatu peluang (opportunity). Dengan demikian, independensi dapat berfungsi sebagai faktor awal/mitigasi terhadap pencegahan kecurangan, bersama dengan variabel integritas, profesionalisme dan pengendalian internal.

Rukayyah et al. (2023) dan Indrayani et al. (2021), independensi berdampak pada pengurangan kecurangan. Jika karyawan memiliki sikap independensi dan menerapkannya dalam organisasi atau instansi, maka tindakan pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan mudah

### **H<sub>3</sub>: Independensi Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan.**

### **Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Profesionalisme adalah kemampuan dan keandalan pegawai untuk melakukan dan menyelesaikan tugas dengan prosedur mudah, cermat dan tepat untuk mencapai tujuan (Rabbany dan Nugroho, 2021). Diharapkan bahwa profesionalismenya akan memungkinkannya untuk menemukan dan mencegah segala jenis kecurangan. Namun, karena beberapa alasan, termasuk pemecatan, pemecatan, pengucilan, bahkan pengancaman beberapa anggota staf sipil pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap semua jenis kecurangan.

Profesionalisme adalah norma perilaku yang digunakan untuk meningkatkan kinerja. Sukses pemerintahan bergantung pada profesionalisme. Menunjukkan sikap profesional yang baik dapat meningkatkan kinerja seorang pegawai negeri. Penjelasan ini dapat dihubungkan dengan teori segitiga kecurangan yang dimana ASN yang memiliki Tingkat profesionalisme yang tinggi cenderung lebih berkomitmen untuk bertindak secara jujur, adil, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam birokrasi atau pemerintahan. ASN yang profesional akan lebih mampu menolak tekanan (pressure) dan peluang (opportunity) untuk terlibat dalam Tindakan kecurangan. Rahmawati et al., (2023) menemukan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan; tingkat profesionalisme yang lebih tinggi pada seorang anggota staf akan menghasilkan hasil kinerja yang lebih baik.

### **H<sub>4</sub>: Profesionalisme Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. Sasaran dalam penelitian ini adalah ASN yang menduduki posisi jabatan mulai dari eselon 2, 3, dan 4 yang berada pada 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau. Adapun jumlah populasi dibagi berdasarkan jabatan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Populasi Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	46 Orang
2	Sekretaris	36 Orang
3	Kepala Bidang/Kepala Bagian	184 Orang
4	Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian/Kepala Tim	486 Orang

Pada penelitian ini dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling dimana pemilihan sampel berdasarkan pada maraknya jabatan-jabatan tertentu dalam terjadinya kecurangan terutama pada bagian keuangan yang memegang kuasa penuh atas jalannya keuangan di suatu instansi. Sehingga sebanyak 184 pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan pada 46 OPD menjadi sampel. Data rimer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tanggapan langsung responden terhadap kuesioner terstruktur. Penelitian ini memanfaatkan analisis data dan statistic untuk menguji kuantitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner (Sugiyono, 2018). Kuesioner tertutup adalah saat responden hanya bisa memilih jawaban dari opsi yang sudah diberikan. Mereka hanya bisa memilih jawaban yang ada dan tidak bisa menjawab dengan bebas. Berikut merupakan definisi operasional dalam penelitian ini.

**Tabel 2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ) (Y)	Pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ) adalah upaya kompleks yang bertujuan untuk menghentikan unsur-unsur yang mendorong kecurangan Hastika, (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi terpisah yang memungkinkan mengecek antar fungsi</li> <li>b. Sistem pengujian dan operasi yang memadai dalam sistem komputer</li> <li>c. Tugas dibagi dengan adil dan diawasi dengan baik</li> <li>d. Pedoman untuk mengelola file yang digunakan dalam pemrosesan komputer</li> <li>e. Prosedur curah pendapat yang efektif digunakan</li> <li>f. Melaporkan kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan dengan Laporan mengenai kegiatan yang mencurigakan pegawai lainnya</li> <li>g. Kebijakan anti penipuan ditetapkan</li> <li>h. Komitmen mengenai manajemen dan ASN dalam melaksanakan kegiatan anti penipuan</li> </ul> Hastika, (2014)	Likert
Pengendalian Internal (X1)	Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip moral dan integritas</li> <li>b. Penilaian Risiko</li> <li>c. Filosofi dan pendekatan manajemen</li> <li>d. Informasi relevan dan diandalkan</li> <li>e. Perancangan, penggunaan dokumentaasi dan pengecekan</li> <li>f. Otorisasi dan pemisahan fungsi yang memadai</li> </ul>	Likert



Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
	kepatuhan tercapai dengan tepat. COSO, (2013)	g. Menyediakan, mengelola, mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi. COSO, (2013)	
Integritas (X2)	Komponen karakter yang menentukan sikap profesional adalah integritas, yang berarti bersikap jujur dan terbuka tanpa mengorbankan rahasia peminta jasa; namun, integritas tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi. (Susanto, 2020).	a. SikapKejujuran b. Sikap keberanian c. Sikap Kebijaksanaan d. Sikap Tanggung Jawab (Susanto,2020)	Likert
Independensi (X3)	Independensi adalah berpikir secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain. (Hartan, 2016)	a. <i>Independence in fact</i> b. <i>Independence in Appreance</i> c. <i>Independence competence</i> (Hartan, 2016)	Likert
Profesionalisme (X4)	Keyakinan yang dikenal sebagai profesionalisme aparatur adalah keyakinan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan dan layanan didasarkan pada pengetahuan dan prinsip-prinsip profesi dengan prioritas kepentingan publik. (Agus,2011)	a. Perlakuan yang sama terhadap pelayanan yang diberikan b. Memperlakukan masyarakat dengan adil dan setara c. Loyalitas dan kesetiaan pada lembaga yang ditunjukkan dengan pelayanan yang baik d. Tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan pada lembaga pemerintah	Likert

Dalam studi ini, peneliti akan memanfaatkan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution versi 23 untuk menganalisis data. Setelah berhasil mengumpulkan informasi yang diperlukan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data diuji dengan statistik deskriptif dan uji kualitas data seperti uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Selain itu, juga dilakukan analisis regresi berganda dan uji hipotesis, seperti uji signifikan parameter individual (uji statistik t), uji koefisien determinasi, dan uji normalitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Karakteristik Responden*

Data karakteristik responden didasarkan pada distribusi mengenai jabatan, jenis kelamin, Umur, Agama, Pendidikan Terakhir, dan Lama menjabat. Terdapat beberapa Jabatan yang pada penelitian ini menjadi responden. Jumlah Jabatan yang memberikan jawaban terbanyak adalah Kasi/Kasubbag/Katim berjumlah 61 dari 486 orang dengan persentase 12,55%. Seluruh responden yang diteliti meyakini agama Islam dengan jumlah total 135 responden. Untuk responden terbanyak berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 84 responden atau 62,2%. Umur rata-rata yang menjadi responden terbanyak yakni 41-50 tahun berjumlah 59 responden atau 43,7%. Untuk pendidikan Terakhir rata-rata pendidikan Terakhir yang paling banyak adalah Magister (S2) dengan jumlah 77 responden atau 57%. Sedangkan untuk masa

jabatan paling banyak diduduki oleh masa jabatan > 10 Tahun yakni berjumlah 56 responden atau 41,5%.

### Hasil Uji Analisis Deskriptif

Nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan deviasi standar disajikan dalam statistik deskriptif untuk memberikan informasi yang jelas. atau deskripsi data tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan akhir penelitian (I. Ghozali, 2018). Tabel berikut merupakan hasil dalam statistic deskriptif:

**Tabel 3**

### Hasil Uji Analisis Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Pengendalian Internal	135	23	35	31,61	2,899
Integritas	135	18	25	23,00	2,019
Independensi	135	17	25	21,76	2,408
Profesionalisme	135	23	30	27,79	2,395
Pencegahan	135	25	35	30,93	3,206
Kecurangan					
Valid N (Listwise)	135				

Sumber: Data diolah, 2024

### Hasil Uji Validitas

(Ghozali, 2018) menyatakan pengujian validitas penelitian apakah terdapat kebenaran dari jawaban pada kuesioner. Dalam situasi di mana keputusan dibuat berdasarkan nilai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) > rtabel 0,1690. Adapun hasil uji validitas sebagai berikut:

**Tabel 4**

### Hasil Uji Validitas

Instrumen Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pencegahan Kecurangan			
P1	0.774	0,1690	Valid
P2	0.792	0,1690	Valid
P3	0.780	0,1690	Valid
P4	0.754	0,1690	Valid
P5	0.739	0,1690	Valid
P6	0.756	0,1690	Valid
P7	0.775	0,1690	Valid
Pengendalian Internal (X1)			
P1	0.550	0,1690	Valid
P2	0.620	0,1690	Valid
P3	0.762	0,1690	Valid
P4	0.777	0,1690	Valid
P5	0.842	0,1690	Valid
P6	0.817	0,1690	Valid
P7	0.763	0,1690	Valid
Integritas (X2)			
P1	0.710	0,1690	Valid
P2	0.755	0,1690	Valid
P3	0.809	0,1690	Valid
P4	0.783	0,1690	Valid
P5	0.819	0,1690	Valid
Independensi (X3)			
P1	0.675	0,1690	Valid
P2	0.742	0,1690	Valid
P3	0.835	0,1690	Valid
P4	0.803	0,1690	Valid
P5	0.768	0,1690	Valid
Profesionalisme (X4)			



Instrumen Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.743	0,1690	Valid
P2	0.848	0,1690	Valid
P3	0.797	0,1690	Valid
P4	0.819	0,1690	Valid
P5	0.792	0,1690	Valid
P6	0.823	0,1690	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

### Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi seberapa dapat dipercaya suatu instrumen pengukuran atau kuesioner untuk menghasilkan hasil yang konsisten (L. Ghozali, 2017). Kuesioner dianggap memiliki reliabilitas jika jawaban responden tidak berubah atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Penelitian apabila dikatakan realibel atau dapat dipercaya dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2017). Tabel berikut memberikan hasil uji reliabilitas:

**Tabel 5**

### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach alpha	Kriteria Reliabel	Keterangan
Pengendalian Internal	0.860	0.700	Reliabel
Integritas	0.830	0.700	Reliabel
Independensi	0.819	0.700	Reliabel
Profesionalisme	0.890	0.700	Reliabel
Pencegahan Kecurangan	0.882	0.700	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

### Hasil Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah nilai dalam model dapat terdistribusi secara normal, penelitian ini memanfaatkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S). Ketika nilai pada  $asym.sig > 0.05$ , nilai residual terstandarisasi uji dapat dianggap berdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov Smirnov (K-S) penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.:

**Tabel 6**

### Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		135
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.000000
	Std. Deviation	1,08763535
Most Extreme Difference	Absolute	0.068
	Positive	0.068
	Negative	-0.068
Test Statistic		0.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

Sumber: Data diolah, 2024

### Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika kita ingin mengevaluasi apakah terdapat keterkaitan antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2016). Untuk mengevaluasi multikolinieritas dengan melihat nilai faktor variasi inflasi (VIF) atau variabel independen masing-masing. Tidak ada hubungan kuat antara variabel bebas dalam model regresi jika nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Nilai tolerance dan VIF untuk setiap variabel dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengendalian Internal	0.573	1.745	Tidak Terjadi Multikolienaritas
Integritas	0.503	1.988	Tidak Terjadi Multikolienaritas
Independensi	0.556	1.797	Tidak Terjadi Multikolienaritas
Profesionalisme	0.514	1.944	Tidak Terjadi Multikolienaritas

Sumber: Data diolah, 2024

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam variasi model regresi antara residual dari satu observasi dengan yang lainnya. Dengan menggunakan uji glejser, tidak ada heteroskedastisitas dalam penelitian ini jika taraf signifikansi melebihi 5%. Hasil uji heteroskedastisitas dengan glejser ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Undstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	.469	1.479	0.317	.752
Pengendalian Internal	-.027	.039	-0.692	.490
Integritas	.058	.081	-0.722	.472
Independensi	.574	.049	1.207	.230
Profesionalisme	.045	.062	0.723	.471

Sumber: Data diolah, 2024

**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuktikan arah antara variabel independen dan dependen. Uji regresi untuk menilai nilai koefisien regresi yaitu nilai t-statistik dan nilai signifikansi. Adapun hasil dari pengujian regresi menggunakan SPSS versi 23 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Undstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	4.639	4.348	1.067	.288
Pengendalian Internal	.324	.159	2.034	.044
Integritas	.657	.069	9.454	.000
Independensi	.202	.098	2.055	.042
Profesionalisme	.262	.117	2.238	.027

Sumber: Data diolah, 2024

Dari tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan regresi linear berganda yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 4,639 + 0,324X_1 + 0,657X_2 + 0,202X_3 + 0,262X_4 + e$$

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan cara yang digunakan untuk menilai seberapa efektif sebuah model dalam menjelaskan variabel yang ditentukan dengan syarat memiliki nilai



koefisien yang berada dalam 0 dan 1. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ):

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Koefisien determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.756 <sup>a</sup>	.572	.559	0.992

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan nilai Adjusted R Square ( $R^2$ ) adalah 0,559 dalam tabel perhitungan analisis regresi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Pencegahan Kecurangan dipengaruhi sebesar 55,9% oleh variabel Pengendalian Internal, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme, sedangkan 44,1% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel independen lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

### **Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan**

Tabel berikut menunjukkan hasil uji hipotesis. Tujuan dari uji T adalah untuk mengevaluasi seberapa besar dampak satu variabel independen terhadap variasi variabel dependen:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	t-tabel	t-hitung	Sig.	Hasil
(Constant)		1.067	.288	
Pengendalian Internal	1,657	2.034	.044	H1 Diterima
Integritas	1,657	9.454	.000	H2 Diterima
Independensi	1,657	2.055	.042	H3 Diterima
Profesionalisme	1,657	2.238	.027	H4 Diterima

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diperoleh nilai t hitung sebesar 2,034 dengan nilai signifikansi 0,044. Hasil penelitian ini menunjukkan t hitung > t tabel ( $2,034 > 1,657$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,044 < 0,05$ ). Hal ini berarti hasil pengujian antara Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan memiliki pengaruh yang signifikan. Tingkat signifikansi sebesar  $0,044 < 0,05$  yang berarti H1 diterima dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (Kurniawan & Haq, 2022). Hal tersebut membuktikan bahwa Ketika pengendalian internal bekerja dengan baik, mereka dapat mencegah kecurangan. Ini dinilai penting untuk menerapkan pendekatan untuk menghentikan penipuan. Ketika pengendalian internal digunakan dengan benar, mereka dapat mencegah kecurangan. Pemerintah Provinsi Riau melakukan pengendalian selain melalui pengendalian internal pada masing-masing ASN atau ASN juga melakukan pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern yang telah digalakkan oleh pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan agar setiap instansi mencapai Pengaruh yang baik dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, perlindungan aset daerah, dan ketaatan pada hukum (Dewi & Ratnadi, 2017). Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan, yang mengatakan bahwa direktur harus mengawasi manajer dalam hal pengelolaan pemerintahan yang efektif. Salah satu masalah yang muncul dalam teori keagenan adalah asimetri informasi, yang disebabkan oleh ketimpangan informasi antara direktur dan agen. Studi ini dapat mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al. (2021) dan Silambi et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini juga didukung oleh teori penetapan tujuan atau goal setting, yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan semua tindakan atau perilaku yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $9,454 > 1,657$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti hasil pengujian antara Integritas terhadap Pencegahan Kecurangan memiliki pengaruh yang signifikan. Tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_1$  diterima dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Integritas memiliki pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tingkat integritas ASN akan meningkatkan pencegahan kecurangan (fraud) (Olivia & Lastanti, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, upaya dalam mengurangi terjadinya kecurangan yang didasarkan pada integritas yakni berupa masing-masing Kepala Dinas membangun manajemen kinerja yang mencakup penetapan kinerja dan laporan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ASN yang objektif tentu akan memotivasi ASN dalam berkinerja dengan baik. Hasil penilaian Kinerja yang objektif akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan promosi dan mutasi ASN. Sehingga ASN yang dihasilkan dapat memiliki tanggung jawab pada pekerjaannya dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya. Ketika seorang ASN memiliki integritas yang tinggi dalam dirinya maka ASN tersebut mampu menghadapi kondisi dimana Ketika ada suatu opportunity (peluang) dan pressure untuk melakukan kecurangan ASN tersebut dapat mencegah dan tidak melakukan tindakan kecurangan tersebut (Widiawati & Eriswanto, 2023). Menurut Cressey dalam Tuannakotta, ada tiga ciri umum kecurangan, dan temuan penelitian ini dapat dihubungkan dengan teori segitiga kecurangan. Tiga kondisi umum yang hadir saat kecurangan terjadi adalah tekanan (tekanan), peluang (peluang/kesempatan), dan penjelasan. Ini dikenal sebagai tiga segi tiga kecurangan. Menurut Putri (2021) dan Widiawati & Eriswanto (2023), Integritas ASN memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pencegahan penipuan. Penelitian yang dilakukan dapat mendukung temuan ini. Menurut prinsip integritas, setiap karyawan di perusahaan harus memiliki sikap yang berlandaskan kejujuran, bijaksana, keberanian, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan sebagai dasar pengambilan keputusan mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $2,055 > 1,657$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  ( $0,042 < 0,05$ ). Hal ini berarti hasil pengujian antara Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan memiliki pengaruh yang signifikan. Tingkat signifikansi sebesar  $0,042 < 0,05$  yang berarti  $H_1$  diterima dengan demikian dapat dikatakan bahwa Independensi memiliki pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Hal itu menunjukkan bahwa semakin independen seseorang, semakin tinggi juga tingkat pencegahan kecurangan di perusahaan atau instansi tersebut. Independensi dapat memainkan peran penting dalam mencegah kecurangan (Wijaya & Adechandra A. P, 2020). ASN yang memiliki Tingkat independensi yang tinggi lebih mampu menolak tekanan (pressure) untuk terlibat dalam suatu tindakan kecurangan. Selain mampu menolak tekanan (pressure) seorang ASN dengan tingkat independensi yang tinggi juga mampu menolak terlibat dalam tindakan kecurangan Ketika adanya suatu peluang (opportunity). Dengan demikian, independensi dapat berfungsi sebagai faktor awal/mitigasi terhadap pencegahan kecurangan, bersama dengan variabel pengendalian internal, integritas, dan profesionalisme. ASN Pada OPD Provinsi Riau telah bebas dari kepentingan pribadi, telah mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku, membuat keputusan secara independen, menyampaikan pandangan atau pendapat sesuai dengan pendapat pribadi dan mematuhi semua regulasi yang berkaitan dengan independensi ASN. ASN yang independen merupakan seseorang yang dapat membuat keputusan atau kebijakan tanpa membutuhkan bantuan dari pihak lain. Studi baru dapat mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada pengaruh independensi dalam mencegah kecurangan (Erwin Panjaitan et al., 2021) Hal ini dapat dikatakan bahwa memiliki sertifikat independensi auditor internal akan membantu mereka mencegah kecurangan di PT ARI

(Wulandari & Nuryanto, 2018) Secara parsial, independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.



Hasil penelitian ini menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $2,238 > 1,657$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  ( $0,027 < 0,05$ ). Hal ini berarti hasil pengujian antara Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan memiliki pengaruh yang signifikan. Tingkat signifikansi sebesar  $0,027 < 0,05$  yang berarti  $H_1$  diterima dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Profesionalisme memiliki pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang ASN maka akan memungkinkan untuk meningkatkan tanggungjawab dalam melakukan pencegahan kecurangan (Aisyah et al., 2017). Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi terjadinya kecurangan berdasarkan profesionalisme memiliki berbagai upaya yang dapat dijabarkan seperti menyusun perencanaan kebutuhan dan pemenuhan ASN. Tidak adanya perencanaan dalam SDM merupakan salah satu faktor penyebab masalah kekurangan SDM pengawasan ataupun auditor sehingga tidak efektifnya OPD dalam mendukung peningkatan kinerja dan pengawasan (Rabbany & Nugroho, 2021). ASN yang memiliki Tingkat profesionalisme yang tinggi cenderung lebih berkomitmen untuk bertindak secara jujur, adil, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam birokrasi atau pemerintahan. ASN yang profesional akan lebih mampu menolak tekanan (pressure) dan peluang (opportunity) untuk terlibat dalam Tindakan kecurangan. Penelitian dapat mendukung temuan penelitian sebelumnya (Nurbaiti et al., 2022) yang menemukan bahwa kualitas bukti yang diberikan auditor berkorelasi negatif dengan tingkat profesionalisme auditor. Penelitian lain (Wulandari & Nuryanto, 2018) menemukan bahwa auditor profesional memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah sebagaimana adanya daripada melakukannya untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (studi empiris di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau). Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yakni metode dalam penyebaran dan pengumpulan data hanya dengan menggunakan kuesioner, penelitian hanya terfokus pada objek penelitian yakni ASN Pemerintah Provinsi Riau, sehingga belum terdapat jelas suatu gambaran dan menggeneralisasi keadaan pada daerah lainnya, dalam pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang hanya ditujukan pada kelompok ASN yang memiliki jabatan pada Pemerintahan Provinsi Riau, sehingga belum terdapat jelas suatu gambaran jelas dan menggeneralisasi keadaan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang ada untuk peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya disarankan memilih metode yang tepat dalam pengumpulan data yang lebih akurat seperti wawancara, dengan mendampingi secara langsung semua responden saat pengisian kuesioner agar tidak terdapat salah persepsi dalam mengisi butir pertanyaan didalam kuesioner. Peneliti selanjutnya juga lebih memperluas lingkup penelitian, tidak terbatas hanya pada ASN yang memiliki jabatan dan juga tidak terbatas hanya pada ASN yang berada pada lingkungan Pemerintah Provinsi Riau saja serta mempertimbangkan variabel independen lainnya diluar dari penelitian ini misalnya kompetensi, Good Corporate Governance, kesadaran anti-fraud, Motivasi, Moralitas Individu dan lainnya dengan memanfaatkan studi ini sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian baru pada kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah Indonesia dapat menggunakan nilai-nilai spiritual untuk mencegah kecurangan yang merugikan negara. Selain itu, para pemimpin harus memperhatikan kondisi Pengendalian Internal ASN yang baik dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal, integritas ASN, independensi dalam melakukan pekerjaan pada ASN, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat untuk mencapai visi dan misi organisasi.

## REFERENSI

- Aisyah, M. F., Utami, W., Sunardi, S., & Sudarsih, S. (2017). Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4753>
- Ayu Az-Zahra, R. S., Jaelani, A., & Nursi, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(2), 38–44. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i2.555>
- Dewi, K. Y. K., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Pada Pencegahan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 917–941.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256778748>
- Erwin Panjaitan, J., Fitriana, F., & Saepudin, D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal dalam Mencegah Kecurangan (FRAUD). *Jurnal Syntax Transformation*, 2(10), 1513–1426. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.429>
- Farah, W., & Rahmawati, D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). *Akuntabilitas*, 14(1), 127138. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.20872>
- Febriansyah, A., & Indirwan, I. (2022). Pengaruh Integritas Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(2), 220–230. <https://doi.org/10.34010/jemba.v2i2.8575>
- Fitroh Nurani, E. O. (2016). Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada Telkom Foundation. *Jurnal Riset Akuntansi*, VIII(1).
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, L. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ibrahim, M., Nurmayanti, P., & Indrawati, N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Organisasi Dan Anti-Fraud Awareness Terhadap Pencegahan Fraud. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(1), 117–132. <https://doi.org/10.31258/current.4.1.117-132>
- Indrayani, S., Arman, A., Mira, Dewi Zettira, N., Herman, N., Salam, & Sarda, S. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(2), 563–572. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1685>
- Kivaayatul, Purwantini, A. H., & (2022), A. (2022). *Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa*. 13(2), 202–217.
- Kurniawan, J., & Haq, A. (2022). Pengaruh Moralitas Individu, Integritas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1691–1702. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14532>
- Leighton Silambi, I., Mannan, A., & Said, D. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*,



- 16(2), 122–132. <https://doi.org/10.26487/akrual.v16i2.25565>
- Makarimovic, A., Setyanto, E., & Handayani, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(2), 167. <https://doi.org/10.32663/jaz.v5i2.2952>
- Nurbaiti, N. F., Malikah, A., & Junaidi. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja, Pengalaman Dan Profesionalisme Terhadap Pengungkapan Fraud Pada Kap (Kantor Akuntan Publik) Di Kota Malang. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Olivia, & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Independensi, Whistleblowing System, Anti-Fraud Awareness, Dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 261–272. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14217>
- Pratama, A. D. Y. (2022). Jurnal Kajian Bali. *Journal of Bali Studies*, 11(2), 370–386.
- Purnamasari, I., Rismawati, R., & Rusli, A. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap deteksi kecurangan pada PT. Mega auto finance palopo. *Jesya*, 6(2), 1696–1701. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1154>
- Putri, N. E. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Distributor Farmasi Pekanbaru. *Prosding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1(1), 122–130.
- Rabbany, & Nugroho. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Sensitivitas Etika, Pertimbangan Etis, Personal Cost, Dan Reward Terhadap Intensi Internal Whistleblowing Guna Mencegah Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BPKAD Kota dan Kabupaten Magelang). *The 4th FEBENEFECIUM*, 429–454.
- Rahmawati, Y., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Integritas, Profesionalisme Auditor Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1475–1486. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.638>
- Rosari, R., Zacharias, J., & Pono, M. R. (2021). Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 251–276. <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i2.393>
- Rukayyah, M., Wawo, A., Sari, N. R., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating. *Isafir Islamic Accounting And Finance Review* 4, 92–106. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>
- Saputra, I. K. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh Independensi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Ubud. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 142–166. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.770>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widiawati, S., & Eriswanto, E. (2023). Pengaruh Corporate Culture Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud. *Akuntoteknologi*, 15(1), 177–186. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i1.2130>
- Wijaya, C. L., & Adechandra A. P. D. (2020). Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Iklim Etika-Egoisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 78. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24230>
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>